



## ABSTRACT

Optimalisasi Potensi Ekowisata Halal Melalui Peran BUMDES Sebagai Alternatif Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

[Rodi Syafrizal]

[rodisyafziral@gmail.com]

[Mahasiswa Program Doktoral Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]

[Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya]

[Ella Annissa]

[ella.annissa@ar-raniry.ac.id]

[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]

*Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekowisata berbasis halal tourism melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Urgensi penelitian ini didasarkan pada rendahnya kinerja BUMDes yang belum maksimal dalam memanfaatkan potensi pariwisata desa, padahal tren wisata halal secara global menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi segmen pasar yang menjanjikan. Indonesia, dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki peluang besar untuk mengembangkan destinasi wisata halal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi ekowisata berbasis halal tourism melalui BUMDes dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan pengangguran, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini menghasilkan model konseptual pengelolaan BUMDes wisata halal yang terintegrasi dengan potensi lokal, mencakup strategi jangka pendek (peningkatan kapasitas dan pelayanan BUMDes), jangka menengah (penguatan kelembagaan dan jejaring pemasaran), dan jangka panjang (kebijakan berkelanjutan untuk mendukung desa mandiri). Model ini diharapkan menjadi solusi atas rendahnya kontribusi BUMDes terhadap perekonomian desa serta menjadi rujukan kebijakan pengembangan pariwisata halal di daerah lain.*

**Keywords:** *Optimalisasi, Ekowisata, Halal Tourism, & BUMDes*



## Pendahuluan

Daerah pedesaan masih mendominasi kemiskinan di Indonesia dan sudah sejak lama menjadi agenda pemerintah dalam pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil yang harus disejahterakan. Melalui pembangunan desa diharapkan dapat menciptakan kemandirian dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Salah satu cara mendorong pembangunan dan kemandirian desa yaitu melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (Metalia et al., 2023). BUMDes merupakan salah satu lembaga yang dibentuk desa sebagai forum desa yang setiap kegiatannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui inovasi pemberdayaan potensi desa serta mengoptimalisasi aset-aset desa sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian dan mendorong pembangunan serta pendapatan desa (Ni Putu Novianti, et, 2022). Di Indonesia tercatat sebanyak 2.188 BUMDes yang mangkrak atau tidak beroperasi, akan tetapi terdapat 1.670 BUMDes yang beroperasi namun belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa (Syafrizal et al., 2022). Hal ini sejalan dengan Seperti disampaikan oleh Forum Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa dari 27.067 BUMDes hanya sekitar 10% yang usahanya jalan. Sisanya tidak jalan, dan ada yang jalan tetapi tidak memberikan keuntungan serta kontribusi terhadap perekonomian masyarakat desa (Suryanto, 2018).

### Gambar 1 Kumulasi Jumlah BUMDES Alokasi Modal Dan Pendapatan Desa



Sumber: [www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)



Jumlah BUMDes terus bertambah dari tahun 2014 hingga tahun 2020 hingga mencapai 51.134 dengan alokasi dana desa sebagai modal BUMDes mencapai Rp. 4,2 Triliun namun hanya memperoleh pendapatan asli desa mencapai Rp. 1,1 Triliun. Hal ini tentunya menjadi bukti kegagalan dalam pengelolaan BUMDes serta menjadi tugas pemerintah dalam melakukan evaluasi program desa sehingga lebih efektif (Manurung, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BUMDes belum mampu berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, BUMDES perlu direvitalisasi dan dikembangkan pada sektor produktif seperti bisnis pasca-panen atau industri ekonomi kreatif berbasis kearifal lokal dan pariwisata (Siswanda & Meirinawati, 2021). Serdang Bedagai sendiri memiliki potensi pariwisata yang cukup menarik seperti destinasi pantai, pulau, air terjun, pemandian alam dan wisata arung jeram. Namun sayangnya potensi wisata tersebut kurang dimanfaatkan oleh BUMDES setempat untuk dikembangkan menjadi produk wisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Desa wisata saat ini sangat potensial dikembangkan, mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan (Khairani & Yulistiyono, 2023).

Dimana apabila potensi wisata tersebut dikelola dengan baik tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal (Mustofa & Tampubolon, 2022). Pariwisata desa mampu menopang perekonomian masyarakat lokal dengan mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan (Hastutik et al., 2021). Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pengelolaan obyek wisata oleh BUMDES dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penghasilan pada masyarakat setelah setelah pemberdayaan potensi pariwisata dalam program BUMDES (Fadllan & Maufiroh, 2023). Saat ini konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, setra gaya hidup. Halal tourism kini telah menjadi segmen yang tumbuh paling pesat dalam bisnis pariwisata dunia tidak hanya dikembangkan



negara-negara muslim tetapi secara global dan berupaya memperkenalkan wisatanya dengan konsep halal (Fadhlan & Subakti, 2020).

**Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Pasar Pariwisata Halal**



Sumber: <https://www.kompasiana.com>

Laporan *Mastercard Crescentrating Global Travel Market Index* (GMTI) menunjukkan data pertumbuhan dan proyeksi kunjungan wisatawan Muslim dunia akan terus meningkat setelah terjadinya penurunan selama pandemic Covid-19. Pada tahun 2028 diproyeksikan kedatangan wisatawan Muslim akan meningkat hingga 230 juta kedatangan dengan spending mencapai USD225 miliar (Gamal, 2022)

**Gambar 3 Potensi Halal Tourism**



Sumber: <https://katadata.co.id/>

Selaras dengan prediksi tersebut, *Global Islamic Economy Report* juga menyebutkan, perputaran uang dari wisata halal dunia diprediksi meningkat, dari 177 miliar dolar AS (2017) menjadi 274 miliar dolar pada 2023 dan akan terus berkembang hingga tahun 2026 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).



Indonesia memiliki keunggulan pada aspek layanan dan aspek komunikasi sub aspek kepedulian masyarakat (Gamal, 2022). Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia sejalan dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global (Samori, Salleh, et al., 2021).

Penelitian ini sangat penting dilakukan dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan nasional dengan sasaran akhir menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pedesaan melalui peran BUMDES dalam pemberdayaan potensi Ekowisata berbasis Halal Tourism sebagai alternatif untuk mengerakan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pembangunan berkelanjutan Desa yang berintegrasi pada Ekowisata berbasis Halal Tourism diharapkan mampu menjadi jawaban masalah kendala pelayanan dan kebutuhan umat muslim dalam berwisata yang menjadi tren pasar global dan berpotensi menjanjikan saat ini. Hasil analisis dapat membentuk konsep, desain, model serta kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan panjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekowisata berbasis Halal Tourism.

## **Kajian Teoritis**

### **Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)**

Teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan (Todaro & Smith, 2015). Dalam konteks desa wisata, pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial masyarakat lokal. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan (*maslahah*) umat secara menyeluruh. Teori pembangunan berkelanjutan menjadi dasar filosofis dalam pengembangan ekowisata halal berbasis BUMDes. Menurut Brundtland Report (World Commission on Environment and Development, 1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk



memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pengembangan ekowisata halal dapat menjadi strategi berkelanjutan bagi desa, karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, BUMDes berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal (Todaro & Smith, 2015).

### **Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Community-Based Economic Empowerment Theory*)**

Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut (Chambers, 1997), pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat memperoleh kendali atas keputusan dan sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks BUMDes, teori ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program wisata halal. Ekowisata halal sebagai bentuk pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan potensi wisata alam dan budaya yang bernilai syariah. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan pendapatan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat modal sosial desa (Satrio & Sabana, 2018). BUMDes, sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa, berperan strategis dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat melalui inovasi produk wisata halal, pengembangan infrastruktur, dan pelatihan sumber daya manusia (Metalia et al., 2023).

### **Teori Ekowisata Halal (*Halal Ecotourism Theory*)**

Ekowisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pendidikan terhadap nilai-nilai ekologi. Menurut *The International Ecotourism Society (TIES)*, ekowisata adalah



perjalanan bertanggung jawab ke wilayah alami yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. menekankan bahwa ekowisata harus berprinsip pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta memberikan pengalaman edukatif kepada wisatawan. Konsep ini sejalan dengan tujuan penelitian, di mana pengelolaan ekowisata oleh BUMDes harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. (The International Ecotourism Society (TIES), 2015). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ekowisata berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi (Hastutik et al., 2021). Di Indonesia, konsep ekowisata berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dan nilai kearifan lokal. Pemerintah mendorong pengembangan desa wisata berbasis ekowisata agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Mustofa & Tampubolon, 2022). Oleh karena itu, integrasi konsep ekowisata dalam pengembangan desa dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan perekonomian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pedesaan.

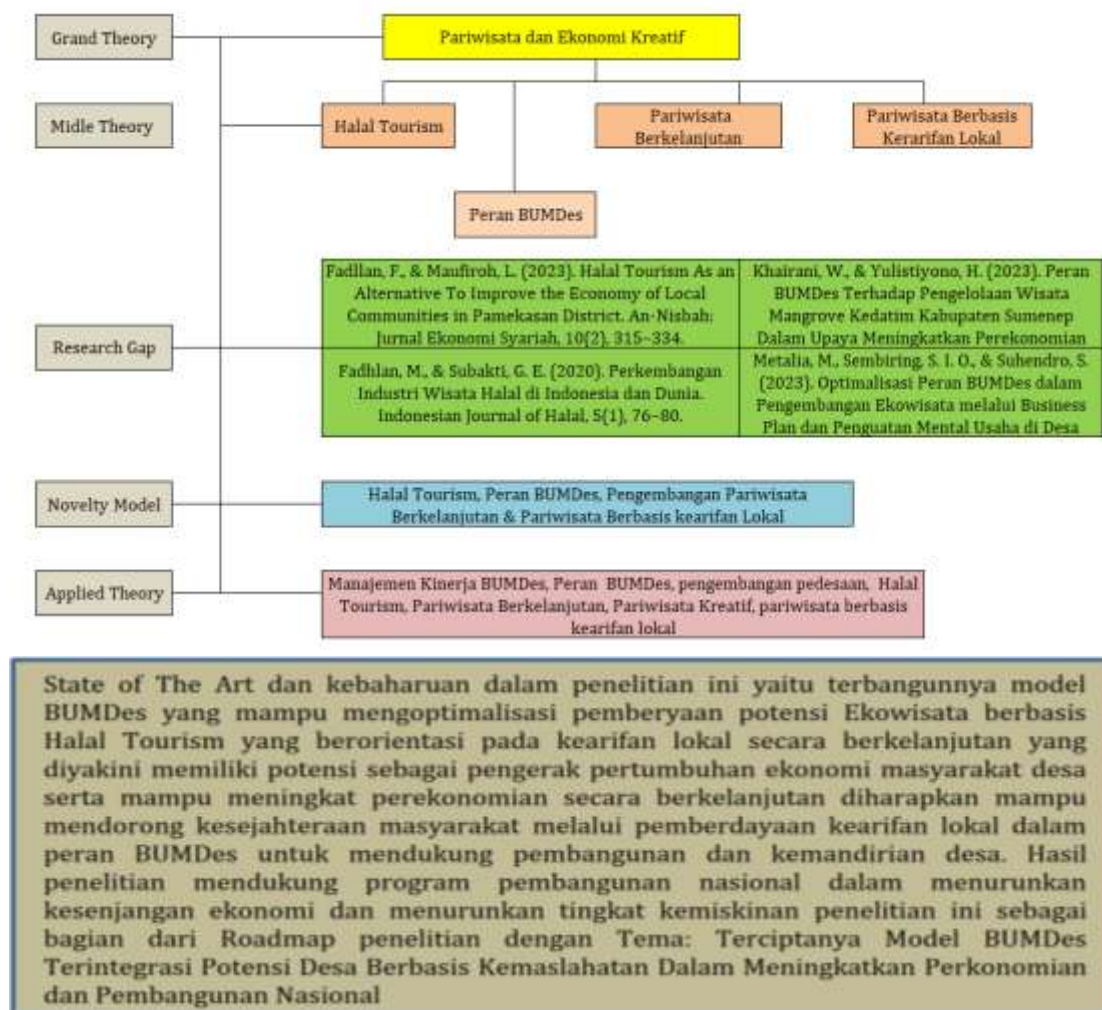
Menurut (Battour & Ismai, 2015), *halal tourism* adalah bentuk pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan memperhatikan prinsip syariah dalam layanan, makanan, akomodasi, dan aktivitas wisata. Pengembangan wisata halal di tingkat desa merupakan bentuk inovasi sosial-ekonomi berbasis nilai Islam, yang mampu menarik wisatawan Muslim domestik dan internasional. *Halal Tourism* merupakan bentuk wisata yang mematuhi nilai-nilai syariah, baik dari segi pelayanan, makanan, hingga fasilitas ibadah. Integrasi antara ekowisata dan halal tourism membentuk konsep *Ekowisata Halal*, yaitu pariwisata ramah lingkungan yang memenuhi prinsip syariah. Teori ekowisata halal merupakan penggabungan antara konsep *ecotourism* (Ceballos-Lascurain, 1996) dan prinsip syariah dalam aktivitas pariwisata (Battour & Ismai, 2015). Teori ini menekankan bahwa wisata halal tidak hanya sebatas pada ketiadaan unsur haram, tetapi juga mencakup nilai etika, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial terhadap



masyarakat sekitar. alam konteks pengembangan desa, teori ini menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjadi motor penggerak implementasi wisata halal melalui:

- 1) Pengelolaan fasilitas dan atraksi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah (seperti kuliner halal, tempat ibadah, dan etika pelayanan),
- 2) Penguatan kapasitas manajerial berbasis tata kelola Islami,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif berbasis nilai-nilai Islam, dan
- 4) Penerapan model bisnis berkelanjutan berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial.
- 5) Pengintegrasian konsep ekowisata halal dengan kelembagaan BUMDes menjadi pendekatan efektif untuk meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan secara inklusif (Samori,et al., 2021)

**Gambar 4. State Of The Art Penelitian**





**Relevansi RIRN 2017-2045, PRN 2020-2024, Roadmap Perguruan Tinggi dan Roadmap Peneliti:**



Penelitian ini sejalan dengan tema payung penelitian, sesuai topik RIRN 2017-2045, PRN 2020-2024 dan roadmap yang merupakan bagian dari milestone “Terciptanya Model BUMDes Terintegrasi Potensi Desa Berbasis Kemaslahatan Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Nasional”. Kebaruan penelitian ini ditandai terbangunnya Konsep ekonomi syariah, Manajemen Pengelolaan BUMDes dan Ekowisata dengan Model BUMDes Wisata Halal Tourism yang diyakini mampu menjadi penggerak perekonomian dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan Pendapatan Desa.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan kajian pustaka, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang didasarkan pada logika yang mampu memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisa SWOT selalu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan strategi kebijakan pada organisasi yang mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi (Fatimah, 2016).



## **Pembahasan**

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi strategis dalam pengembangan ekowisata halal di pedesaan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan pendekatan fenomenologi, ditemukan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata halal tidak hanya bergantung pada potensi alam, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan potensi ekowisata halal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa kelemahan manajerial, minimnya inovasi produk wisata, dan keterbatasan akses terhadap jaringan pasar pariwisata. Untuk mengkaji secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi Melalui pendekatan fenomenologis penelitian ini berangkat dari pengalaman nyata masyarakat pedesaan yang hidup berdampingan dengan sumber daya wisata alam, namun belum memperoleh dampak ekonomi yang signifikan. Kegagalan tersebut muncul akibat lemahnya tata kelola BUMDes, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya inovasi berbasis syariah dalam mengelola potensi wisata. Adapun analisis pendekatan fenomenologid dan teoriti yaitu sebagai berikut:

### **1. Analisis Fenomenologis terhadap Kinerja BUMDes dan Realitas Lapangan**

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini berangkat dari realitas empiris bahwa sebagian besar BUMDes di Indonesia belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, khususnya dalam sektor pariwisata. Fenomena ini terlihat dari banyaknya BUMDes yang tidak beroperasi atau tidak menghasilkan keuntungan signifikan bagi masyarakat (Syafrizal et al., 2022). Secara fenomenologis, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi lokal dan praktik operasional yang masih lemah secara manajerial dan kelembagaan. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun desa memiliki potensi ekowisata tinggi (pantai, air terjun, wisata alam), potensi tersebut belum dikelola secara profesional, bahkan sering kali tidak dikaitkan dengan prinsip *halal tourism*



yang menjadi kekuatan khas masyarakat Muslim. Fenomena ini menggambarkan bahwa persoalan BUMDes bukan sekadar pada kurangnya dana, tetapi juga pada lemahnya transformasi nilai, inovasi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Maka, penelitian ini menempatkan BUMDes sebagai entitas sosial-ekonomi yang tidak hanya perlu diukur dari kinerja ekonomi, tetapi juga dari makna sosial dan nilai spiritual yang melandasi aktivitasnya dalam konteks desa Muslim.

## 2. Analisis Peran BUMDes Pada Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2015) menjelaskan bahwa pembangunan yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan tiga dimensi utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, BUMDes memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut melalui konsep *halal ecotourism*. Dari dimensi ekonomi, pengembangan wisata halal mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru di sektor kuliner, penginapan, serta jasa wisata. Namun, dimensi sosial menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat. BUMDes yang berorientasi partisipatif mampu menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab bersama terhadap aset desa.

Sementara dari dimensi lingkungan, prinsip *ekowisata* menekankan perlunya pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya secara beretika. Fenomena maraknya wisata komersial tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pariwisata desa. Karena itu, teori pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka berpikir bahwa pembangunan desa melalui ekowisata halal bukan hanya tentang profit, melainkan keberlanjutan sosial-ekologis yang bernilai ibadah.



### **3. Analisa Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa**

Teori pemberdayaan (Chambers, 1997) menekankan bahwa pembangunan sejati adalah ketika masyarakat menjadi subjek, bukan objek. Dalam konteks ini, BUMDes berfungsi bukan hanya sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai wadah transformasi sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat lokal. Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menjadi “penonton” dalam aktivitas wisata desa. Dengan menerapkan pendekatan *community-based tourism*, masyarakat harus dilibatkan dalam seluruh rantai nilai ekonomi wisata, seperti pengelolaan homestay, kuliner halal, pemandu wisata, hingga pembuatan cendera mata lokal. Pemberdayaan ini akan meningkatkan kemandirian ekonomi dan modal sosial desa, sesuai dengan prinsip Islam tentang *ta’awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat menjelaskan bahwa solusi terhadap lemahnya kinerja BUMDes adalah membangun struktur partisipatif dan kepemimpinan kolektif yang berbasis nilai syariah.

### **4. Analisa Integrasi Potensi Ekowisata Halal Pada BUMDes**

Teori ekowisata halal menggabungkan prinsip pelestarian lingkungan dengan nilai-nilai syariah dalam pelayanan wisata. Teori ini memberikan dasar bagi desain model BUMDes Wisata Halal sebagai solusi konseptual. Secara fenomenologis, desa-desa dengan potensi alam tinggi sering kali tidak memiliki standar layanan halal, seperti makanan bersertifikat, fasilitas ibadah, dan etika pelayanan Islami. Padahal, wisatawan Muslim global semakin selektif terhadap aspek halal dalam perjalanan mereka. Maka, BUMDes perlu mereposisi diri bukan hanya sebagai pengelola aset desa, tetapi sebagai penyedia layanan halal berbasis ekowisata berkelanjutan. Dalam kasus BUMDes, teori ini memberikan arah konseptual bahwa pengelolaan wisata halal harus memenuhi tiga prinsip utama:



- a) Ketaatan Syariah – seluruh aktivitas wisata harus terbebas dari unsur haram dan mendukung ibadah.
- b) Keberlanjutan Lingkungan – kegiatan wisata harus menjaga kelestarian alam dan budaya lokal.
- c) Kesejahteraan Sosial – kegiatan wisata harus berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa wisata halal belum dikembangkan secara sistematis oleh BUMDes. Potensi alam desa seperti pantai, air terjun, dan agrowisata belum dikemas dalam kerangka syariah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori ini menegaskan perlunya *integrasi model ekowisata halal berbasis BUMDes* yang mampu meningkatkan ekonomi sekaligus memperkuat nilai religius dan ekologi masyarakat. Selain itu masyarakat desa yang berada di kawasan potensial wisata halal sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai religius serta lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas, dilema tersebut dapat dijumpai dengan pendekatan yang integratif dan religius.

#### **5. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

Berdasarkan pendekatan fenomenologis dan analisis SWOT yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan potensi ekowisata halal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa kelemahan manajerial, minimnya inovasi produk wisata, dan keterbatasan akses terhadap jaringan pasar pariwisata.

##### **a) Analisis Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan utama BUMDes terletak pada keberadaannya sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang unik menjadi daya tarik utama ekowisata halal. Selain itu, mayoritas penduduk yang beragama Islam



menjadi faktor pendorong kesesuaian antara nilai-nilai lokal dengan prinsip *halal tourism*, sehingga membangun kepercayaan wisatawan Muslim domestik maupun internasional.

**b) Analisis Kelemahan (*Weakness*)**

Kekuatan utama BUMDes terletak pada keberadaannya sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang unik menjadi daya tarik utama ekowisata halal. Selain itu, mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadi faktor pendorong kesesuaian antara nilai-nilai lokal dengan prinsip *halal tourism*, sehingga membangun kepercayaan wisatawan Muslim domestik maupun internasional.

**c) Analisis Peluang (*Opportunity*)**

Pertumbuhan global wisata halal yang diproyeksikan mencapai USD 225 miliar pada tahun 2028 menjadi peluang besar bagi desa-desa di Indonesia, khususnya yang memiliki potensi ekowisata alami. Dukungan regulasi pemerintah terhadap pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah juga membuka ruang kebijakan yang kondusif bagi pengembangan model BUMDes berbasis *halal tourism*. Tren wisata ramah lingkungan dan kesadaran spiritual pasca-pandemi menjadi momentum strategis dalam memperkuat ekowisata halal.

**d) Analisis Ancaman (*Threat*)**

Ancaman utama datang dari rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta risiko komersialisasi yang dapat menggeser nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, kompetisi antar destinasi wisata halal di tingkat regional menuntut inovasi berkelanjutan dan profesionalisme dalam pelayanan.



## **Kesimpulan**

1. BUMDes memiliki peran strategis sebagai katalisator pembangunan ekonomi desa melalui pengembangan ekowisata halal yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Optimalisasi ekowisata halal mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal.
3. Kendala utama terletak pada lemahnya manajemen dan rendahnya inovasi BUMDes, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM, tata kelola berbasis syariah, dan dukungan kebijakan publik yang sinergis.
4. Model konseptual BUMDes Wisata Halal yang terintegrasi merupakan solusi berkelanjutan dalam mewujudkan desa mandiri ekonomi, sejalan dengan prinsip maqashid syariah dan pembangunan berkelanjutan nasional.

## **Saran**

1. Penguatan Kapasitas Manajemen BUMDes  
Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis manajemen wisata halal, pemasaran digital, dan keuangan syariah bagi pengelola BUMDes.
2. Integrasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Wisata Halal  
Diperlukan sinergi antara Kementerian Desa, Kementerian Pariwisata, dan MUI untuk menciptakan standar nasional desa wisata halal yang jelas, termasuk panduan sertifikasi halal bagi produk wisata.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal  
Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam seluruh rantai nilai wisata halal — mulai dari pengelolaan homestay, kuliner halal, hingga pemandu wisata berbasis nilai Islami.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital  
Pengembangan platform promosi wisata halal berbasis digital marketing perlu dilakukan oleh BUMDes agar dapat menjangkau pasar wisatawan Muslim global.



## 5. Sustainability Policy Framework

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan berkelanjutan yang mendukung BUMDes berbasis ekowisata halal melalui insentif ekonomi, pendampingan bisnis, dan perlindungan terhadap aset alam serta budaya lokal.

### Daftar Pustaka

- Battour, M., & Ismai, M. N. (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19(1).
- Ceballos-Lascrain, H. (1996). *Tourism, Ecotourism, and Protected Areas*. IUCN.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2020). Perkembangan Industri Wisata Halal di Indonesia dan Dunia. *Indonesian Journal of Halal*, 5(1), 76–80.
- Fadllan, F., & Maufiroh, L. (2023). Halal Tourism As an Alternative To Improve the Economy of Local Communities in Pamekasan District. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 315–334. <https://doi.org/10.21274/an.v10i2.8295>
- Fatimah, F. N. D. (2016). *Teknik Analisis SWOT*. Anak Hebat Indonesia.
- Gamal, M. (2022). *Mewujudkan Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata Halal Utama Dunia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/merzagamal8924/62a9bb20f5f32932ae513bc4/mewujudkan-indonesia-sebagai-destinasi-pariwisata-halal-utama-dunia>
- Hastutik, D., Padmaningrum, D., & Wibowo, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), 46. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*. <https://Kemenparekraf.Go.Id/>.
- Khairani, W., & Yulistiyono, H. (2023). Peran BUMDes Terhadap Pengelolaan Wisata Mangrove Kedatim Kabupaten Sumenep Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Lokal. *BuletinEkonomika Pembangunan*, 4(1).
- Manurung, S. D. (2022). *Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembinaan BUMDES di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Metalia, M., Sembiring, S. I. O., & Suhendro, S. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekowisata melalui Business Plan dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 225–233. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i4.1471>
- Mustofa, A., & Tampubolon, L. R. R. U. W. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Wisata Air D'ganjaran Melalui Tata Kelola, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran. *Share: Journal of Service Learning*, 8(2), 228–237. <https://doi.org/10.9744/share.8.2.228-237>



- Ni Putu Novianti, et, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dalam Pengelolaan Keuntungan Objek Wisata Di Desa Ekasari Kabupaten Jembrana. *Konstruksi Hukum*, 3(2), 281–286.
- Samori, Z., Md Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2021). Current Trends on Halal Tourism: Theory and Practice. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2).
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalid, M. . (2021). Current Trends on Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Publika.*, 9(3).
- Satrio, D., & Sabana, C. (2018). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal PENA*, 32(1).
- Siswanda, K. P., & Meirinawati, M. (2021). Peran Badan Usahamilik Desa (Bumdes) Dalam Upayamengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. *Publika*, 9(3), 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p323-334>
- Suryanto, R. (2018). *SDM Hambatan Utama BUMDes*. Harian Jogja. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/10/511/938867/sdm-hambatan-utama-bumdes>
- Syafrizal, R., Rusemewahni, & Sitorus, A. P. (2022). Analysis of Sharia Enterprise Theory on Bumdes Performance Management Based on the Maslahah Scorecard Method (Case Study on Bumdes in Serdang Bedagai Regency). *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, 2(5), 705–716.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. Pearson Education Limited.